

Kampanye Terbuka di Sepuluh Lapangan

SALATIGA (KR) -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga menyiapkan 10 lapangan yang bisa digunakan untuk kampanye terbuka atau istilah sekarang kampanye rapat umum jelang Pemilu 2024. KPU Salatiga dalam keputusan KPU Salatiga Nomor 20 Tahun 2024 tentang lokasi kampanye rapat umum. Wilayah Kecamatan Sidomukti, terdapat dua lapangan masing-masing Lapangan Pule, Kelurahan Mangunsari dan Lapangan Kembangarum, Kelurahan Dukuh.

Kemudian untuk Kecamatan Sidorejo, ada tiga lapangan, terdiri Lapangan BBC, Kelurahan Blotongan, Lapangan Dusun Nogosaren, Kelurahan Bugel dan Lapangan Jayengrono, Kelurahan Kauman Kidul. Wilayah Kecamatan Tingkir, hanya disediakan satu tempat saja yakni di Lapangan Serba Guna Kelurahan Kalibening.

Wilayah ke empat di Kecamatan Argomulyo terdapat banyak lokasi yang disediakan untuk kampanye terbuka rapat umum Pemilu 2024. Lapangan tersebut, Lapangan Bulu Kelurahan Tegalrejo, kemudian Lapangan Brajan Kelurahan Noborejo, Lapangan Promasan, Kelurahan Kumpulrejo dan Lapangan Sukosari, Kelurahan Cebongan.

Komis Pemilihan Umum Salatiga, Wahyu Budi Utomo pada sosialisasi keputusan KPU Salatiga, di Hotel Wahid Salatiga, Sabtu (20/1), mengatakan khusus di Lapangan Pule di Kecamatan Sidomukti lokasinya berdekatan dengan kawasan Rumah Sakit Paru Ngawen Salatiga, maka diharapkan agar sound system dijaga letaknya jangan sampai menghadap rumah sakit sehingga mengganggu.

"Sound system (pengeras suara) tidak dihadapkan ke RS Ngawen. Jangan sampai mengganggu," kata Wahyu Budi Utomo. Ia juga berpesan agar pelaksanaan rapat terbuka yang sudah dijadwalkan ditaati dan menjaga ketertiban. Kampanye terbuka mulai 21 Januari sampai 10 Februari. Sementara wakil Polres Salatiga, Iptu Yulie Hermawan mengatakan bahwa Polres Salatiga netral dan tidak mencampuri urusan politik melainkan hanya sebagai petugas keamanan dan ketertiban. Salah satunya adalah dilarang menggunakan knalpot brong yang melanggar aturan. (Sus)-f

Alsintan Dipastikan Digunakan Semua Petani

SUKOHARJO (KR) - Semua alat mesin pertanian (Alsintan) dipastikan beroperasi digunakan petani untuk mempercepat proses tanam padi pada musim tanam I (MT I). Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo terus mengejar penambahan luasan lahan pertanian untuk ditanami tanaman pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagus Windaryatno, Minggu (21/1) mengatakan, mengaca dari pengalaman dampak cuaca panas ekstrem pengaruhi fenomena alam El Nino sangat mengganggu sektor pertanian karena kekurangan air, maka pada musim hujan ini dimaksimalkan dengan melakukan percepatan tanam padi. Penanaman tanaman pangan non padi juga digencarkan disejumlah wilayah menyesuaikan dengan kondisi tanah setempat.

Percepatan tanam padi dilakukan mengingat kondisi sekarang stok air melimpah. Disisi lain juga mempercepat dan memastikan pemenuhan kebutuhan beras dengan meningkatkan stok pangan. Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo dalam mewujudkan program percepatan tanam padi selain mengandalkan pemenuhan air, juga menggunakan bantuan Alsintan. Dipastikan semua Alsintan yang dimiliki dapat berfungsi dan sudah digunakan petani.

"Dengan cara manual maupun modern semua digunakan. Dipastikan semua Alsintan dapat dioperasikan petani untuk percepatan tanam padi MT I sekarang," ujarnya. Semua Alsintan sudah dicek dan dilihat secara langsung penggunaannya oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo. Penggunaan Alsintan dilakukan di semua wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo juga memastikan sudah banyak petani yang memiliki kemampuan mengoperasikan Alsintan. Sebab sejak awal digunakan tenaga operator Alsintan masih sangat terbatas. Petani sudah dilakukan secara khusus melalui kelompok tapi maupun gabungan kelompok tani. "Prioritasnya memang tanam padi pada MT I. Tapi disejumlah wilayah ada yang menanam non padi. Namun tetap tanaman pangan seperti singkong, ketela, jagung dan lainnya," lanjutnya. (Mam)-f

ASN Banyumas Terima SK Pensiun

BANYUMAS (KR) - Sebanyak 202 Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemkab Banyumas terhitung mulai bulan Februari, Maret dan April 2024 pensiun. Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro, Sabtu (20/1) menjelaskan berkaitan masa pensiun ia sudah menyerahkan SK Pemberhentian dengan hormat karena batas usia pensiun pada Jum'at (19/1) di Pendopo Si Panji Purwokerto. "Mereka yang penerima SK Pensiun sebanyak 202 orang terdiri dari PNS guru dan non guru," kata Hanung.

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Banyumas mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bakti, dedikasi serta pengabdian dan loyalitas dari para pegawai yang akan memasuki masa pensiun. "Semoga senantiasa diberkahi kesehatan dan keberkahan. Di usia pensiun tetap berkarya dan berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa," tuturnya. Menurutnya dengan diterimanya SK Pensiun maka bapak dan ibu telah dinyatakan 'lulus' melewati masa pengabdian sekian puluh tahun untuk bangsa dan negara. Kepala BKPSDM Banyumas Eko Prijanto menjelaskan untuk penerima SK Pensiun terdiri dari 117 PNS guru dan 85 lainnya adalah PNS non guru. (Dri)-f



Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro menyerahkan SK Pensiun.

KR-Driyanto

MEMASUKI PERUBAHAN CUACAATAU IKLIM

Masyarakat Perlu Tingkatkan Kewaspadaan

MAGELANG (KR) - Setiap memasuki musim kemarau atau musim penghujan, perubahan cuaca atau perubahan iklim pasti terjadi. Masyarakat dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya terhadap perubahan-perubahan cuaca ini, terutama perubahan iklim yang luar biasa.

Demikian dikemukakan Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP kepada wartawan usai acara Konferensi dan Pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Magelang periode 2024-2027 yang dilaksanakan di Kantor Pusat PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) atau Bank Bapas 69 Magelang, Sabtu (20/1). Hadir dalam acara ini Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS dan beberapa pengurus PWI Jateng lainnya, Direktur Utama Bank Bapas 69 Rohmad Widodo maupun lainnya. Di forum ini Ketua PWI

Jateng melantik Pengurus PWI Kabupaten Magelang periode 2024-2027 yang diketuai Nina Atmasari.

Bupati Magelang menyampaikan terdengar adanya badai El Nino. Walaupun hal itu sudah berakhir, namun dampaknya masih ada. Karena itu masyarakat diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaannya. Manakala di kan-kirinya ada pohon-pohon besar, mungkin ranting-rantingnya dapat dikurangi agar tidak mengurangi pohon tersebut manakala terjadi angin besar. Masyarakat diminta untuk tetap melakukan langkah-langkah preventif atau langkah awal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Informasi yang diperoleh KR dari Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Magelang Edi Wadono, bahwa pada Jumat (19/1) lalu hingga pukul

18.00 di wilayah Kabupaten Magelang tercatat sekitar 15 kejadian, baik berupa angin kencang dan tanah longsor. Diantara kejadian angin kencang, juga ada yang menyebabkan pohon tumbang yang menutup akses jalan atau mengenai bagian bangunan rumah warga. Bahkan yang terjadi di wilayah Kecamatan Borobudur ada juga yang mengenai jaringan listrik PLN atau mengenai kandang ternak.

Di forum konferensi dan pelantikan pengurus PWI Kabupaten Magelang, Bupati Magelang mengatakan PWI selama ini telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan baik serta turut mendukung program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang, sekaligus turut mensosialisasikan hasil pembangunan tersebut kepada masyarakat.

Melalui pelantikan ini, Zaenal mengajak kepada para pengurus dan anggota PWI Kabupaten Magelang yang baru, untuk memaknai momentum yang sangat strategis bagi PWI guna membangun konsolidasi, evaluasi, penguatan kelembagaan, menyamakan persepsi dan merumuskan pokok program kerja kedepan, melalui peningkatan kinerja dalam upaya mengembangkan pro-

fesionalisme para insan pers. Menurutnya di pundak para pengurus dan segenap anggota PWI terputul beban yang tidak ringan, namun mulia. Untuk itu, guna mencapai tujuan tersebut, maka organisasi PWI ini dituntut untuk tetap eksis dalam mencari data yang akurat serta informasi yang kredibel dan berimbang, yang dibuktikan oleh masyarakat. (Tha)-f



KR-Thoha

Ketua PWI Jateng menyerahkan bendera PWI kepada Ketua PWI Kabupaten Magelang periode 2024-2027.

Belum Ditemukan Pelanggaran Pembayaran UMK 2024

SUKOHARJO (KR) - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo hingga saat ini belum menemukan pelanggaran terkait pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2024 sebesar Rp 2.215.482.

Pengusaha dan buruh sudah mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun demikian pengawasan masih dilakukan petugas dan posko pengaduan tetap dibuka mengantisipasi terjadi pelanggaran pengupahan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Sumarno, Minggu (21/1) mengatakan, sejak awal hingga saat ini pada pertengahan Januari 2024 sudah dilakukan pemantauan disejumlah tempat usaha. Sasarannya yakni terkait realisasi pembayaran UMK tahun 2024. Hasilnya diketahui pihak pengusaha sudah patuh membayar up-

ah buruh sesuai ketentuan. Disisi lain buruh juga sudah menerima upah dengan nominal sesuai UMK tahun 2024.

Disperinaker Sukoharjo hingga saat ini memastikan belum menemukan pelanggaran terkait pembayaran UMK tahun 2024. Masing-masing pihak baik pengusaha dan buruh sudah mematuhi ketentuan berlaku. "Semua sudah berjalan sesuai ketentuan. Belum ada temuan pelanggaran UMK tahun 2024," ujarnya. Pada tahap awal ini Disperinaker Sukoharjo masih memberi kesempatan kepada pengusaha memproses semua proses pembayaran upah buruh.

Meski demikian, petugas tetap melakukan pemantauan penuh dengan berkoordinasi dengan pengusaha maupun serikat buruh.

"Apabila buruh menemukan pelanggaran pembayaran upah tidak sesuai UMK 2024 maka bisa melaporkan ke posko pengaduan atau petugas kami," lanjutnya. Sumarno menjelaskan, Disperinaker Sukoharjo pada akhir Desember 2023 lalu telah selesai melakukan sosialisasi UMK tahun 2024 dengan sasaran pengusaha dan buruh. Hasilnya masing-masing pihak setelah menerima sosialisasi dan waktu kesempatan pengajuan keberatan tidak ada yang mengajukan ke dinas. Pengusaha dan buruh sudah bisa menerima ketetapan upah tahun depan.

Disperinaker Sukoharjo langsung bergerak cepat setelah ada ketetapan UMK tahun 2024 dari gubernur dengan melakukan so-

sialisasi. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dan buruh mengetahui besaran upah yang akan dibayar dan diterima tahun depan. Tidak ada pengusaha yang mengajukan keberatan atau penangguhan pembayaran upah sesuai ketetapan UMK tahun 2024. Artinya pengusaha siap membayar upah.

Disperinaker Sukoharjo memastikan tidak ada pengusaha yang mengajukan keberatan atau penangguhan pembayaran UMK tahun 2024. Hal ini setelah batas waktu yang diberikan telah berakhir. Pihak pengusaha setelah ini diharapkan mematuhi semua ketentuan berkaitan dengan pembayaran upah. "Sudah ada ketetapan UMK tahun 2024 sebesar Rp 2.215.482. Maka itu yang harus dibayar pengusaha dan angka itu yang diterima buruh," lanjutnya. (Mam)-f

Eks Camat Kampanye, Tidak Jelas Sanksinya

KARANGANYAR (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karanganyar mempertanyakan keseriusan Pemkab dalam menetapkan sanksi terhadap mantan Camat Jaten, Teguh Haryono. Hingga kini Pemkab Karanganyar belum menjatuhkan sanksi apapun sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam rekomendasinya, Teguh yang kini duduk sebagai Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Karanganyar dijatuhi sanksi disiplin berat atas pelanggaran netralitas ASN.

Ketua Bawaslu Karanganyar Nuning Ridwanita Prihastuti mengatakan Pemkab mestinya hanya memiliki waktu 14 hari, terhitung sejak diterima rekomendasi ini untuk segera menindaklanjuti putusan KASN tersebut. Apabila tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, maka akan dilakukan tindakan pengendalian berupa peringatan, teguran hingga pemblokiran data kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kami sudah tanyakan dan ngoyak-ngoyak ke Pemkab. Tapi memang putusan ada di sana Pemkab," kata Nuning, Jumat (19/1).

Bawaslu meminta Pemkab segera menindaklanjuti dan memutuskan sanksi terhadap Teguh Haryono sesuai rekomendasi KASN. Sebagaimana rekomendasi yang tertuang dalam surat KASN bernomor R-4899/NK-0100/12/2023 tertanggal 28 Desember 2023, Teguh dijatuhi sanksi disiplin berat. Sanksi tersebut merupakan tindak lanjut dari dugaan pelanggaran hukum lainnya hasil pleno Bawaslu Karanganyar yang diserahkan kepada KASN pada pertengahan Desember 2023.

Jika merujuk dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, pelanggaran disiplin berat sanksi dijatuhkan bisa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau demosi,

pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN alias dipecat.

Terpisah, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Zulfikar Hadid mengatakan tim majelis etik Pemkab Karanganyar langsung menggelar sidang setelah menerima putusan rekomendasi KASN terhadap Teguh Haryono, dia mengatakan Pemkab masih perlu melakukan konsultasi lebih dulu dengan KASN. "Sekarang kami masih menunggu hasil konsultasi KASN. Jadi sudah disidangkan tim setelah menerima rekomendasinya tapi ada yang perlu kami konsultasikan lebih lanjut ke KASN," katanya.

Dijelaskan dalam proses sidang tim Majelis Etik Pemkab Karanganyar telah memanggil Teguh Haryono untuk mendapatkan keterangan atau klarifikasi lebih lanjut dari yang bersangkutan se-

cara langsung. Dari keterangan itu ada beberapa fakta yang belum terungkap saat pemeriksaan Bawaslu. Temuan ini pun menjadi pertimbangan tersendiri dalam rekomendasi untuk memutuskan sanksi tersebut.

"Jadi kami sampaikan dan konsultasikan lagi supaya nantinya jika tetap harus menjatuhkan sanksi disiplin sudah mempertimbangkan semua fakta yg terkait, proporsional, objektif dan berkeadilan," katanya. Zulfikar memperkirakan pekan depan sudah menerima tanggapan dari KASN untuk dasar Pemkab menjatuhkan sanksi bagi Teguh Haryono. Dia menyampaikan tidak ingin memutuskan untuk menjatuhkan sanksi terhadap ASN. Majelis Etik Pemkab Karanganyar mempertimbangkan berbagai aspek untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan. Pertimbangan itu seperti lamanya yang bersangkutan menjabat sebagai ASN hingga prestasi yang dilakukan. (Lim)-f

Caleg Diajak Perbaiki Jalan Rusak

KARANGANYAR (KR) -Jengah jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga Colomadu berinisiatif menambalnya secara mandiri. Mereka juga mengajak calon anggota DPRD ikut berkontribusi. Ruas jalan ditambal kemudian diaspal secara mandiri sepanjang 1 KM di Jalan Tugu Boto Desa Klodran Colomadu sampai perbatasan Boyolali di Pasar Mangu Ngemplak pada Sabtu (20/1).

Sekitar 150 warga sekitar yang tergabung di Relawan Tugu Boto Bersatu mengawalnya dengan mengumpulkan material berupa semen, pasir dan batu kerikil secara patungan. Mereka juga mengajak salah satu caleg dari Partai Gerindra Karanganyar dapil IV, Wawan Pramono untuk ikut berkontribusi.

"Jalan Tugu Boto ini vi-

tal karena akses utama dari Klodran ke Asrama Haji Donohudan serta selalu ramai kendaraan. Baik kendaraan pribadi maupun truk. Tapi berada di perbatasan. Jadi mungkin kurang diperhatikan pemerintah. Kerusakannya enggak segera diperbaiki," kata Ketua Relawan Tugu Boto Bersatu, Agung Prasetyo.

Para relawan menguruk pasir dan kerikil di lubang aspal. Kemudian mengguyurnya dengan adonan aspal panas. Terdapat puluhan lubang menganga di ruas itu. Tambal lubang kemudian dipadatkan dengan cara digilas stoomwalls. "Tenaganya dari warga sendiri. Sedangkan material dari iuran dan sumbangan terkumpul Rp 15 juta," katanya.

Ia mengatakan tambal sulam jalan ini merupa-

kan bentuk protes kepada pemerintah yang mengabaikan keluhan warganya. Meski berulang kali warga meminta perbaikan, namun hanya diacuhkan. Jalan berlubang di Jl Tugu Boto telah banyak memakan korban, terutama saat musim penghujan. Lubang-lubang yang terisi air hujan membuat pengguna kendaraan terperosok.

Setelah selesai menambal di situ, warga akan bergeser menambal ruas jalan kampung di Rt 01/Rw X Desa Klodran.

Caleg Gerindra Karanganyar Dapil IV, Wawan Pramono mengatakan ruas jalan yang diperbaikinya bersama relawan menggunakan metode standar. Meski hanya swadaya, namun pengerjaannya tak asal-asalan. "Pa-kai SOP menambal jalan.

Kalau tidak ditambal lubangnya, kasihan warga yang lewat sini," kata Wawan.

Bantuan memperbaiki jalan dilakukannya bukan hanya di ruas Jl Tugu Boto saja. Melainkan di jalan milik Provinsi Jateng peghubung antarkabupaten Karanganyar dengan

Kabupaten Boyolali di timur Desa Gedongan dan depan Pasar Gawan Colomadu.

"Semoga bisa menggugah pemerintah Provinsi Jateng dan Pemkab Karanganyar agar lebih sinergis menyierusi jalan di perbatasan," katanya. (Lim)-f



KR-Abdul Alim

Gotong royong mengaspal jalan oleh warga Colomadu.